



2024

NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O

PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

Gambaran Umum

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh merupakan perangkat provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur Aceh dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh.

Kelembagaan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh dan Pasal 609 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh.

PANGAGIYA

PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal sampai dengan 60 (enam puluh) Gross Tonnage (GT);
- f. pelaksanaan, pengendalian dan pengoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- pelaksanaan dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan, pengendalian dan pengoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. pelaksanaan, pengendalian dan pengoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal sampai dengan 60 (enam



puluh) GT;

- k. pelaksanaan, pengendalian dan pengoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- m. pelaksanaan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- o. pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal sampai dengan 60 (enam puluh) Gross Tonnage (GT);
- p. pembinaan UPTD; dan
- q. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

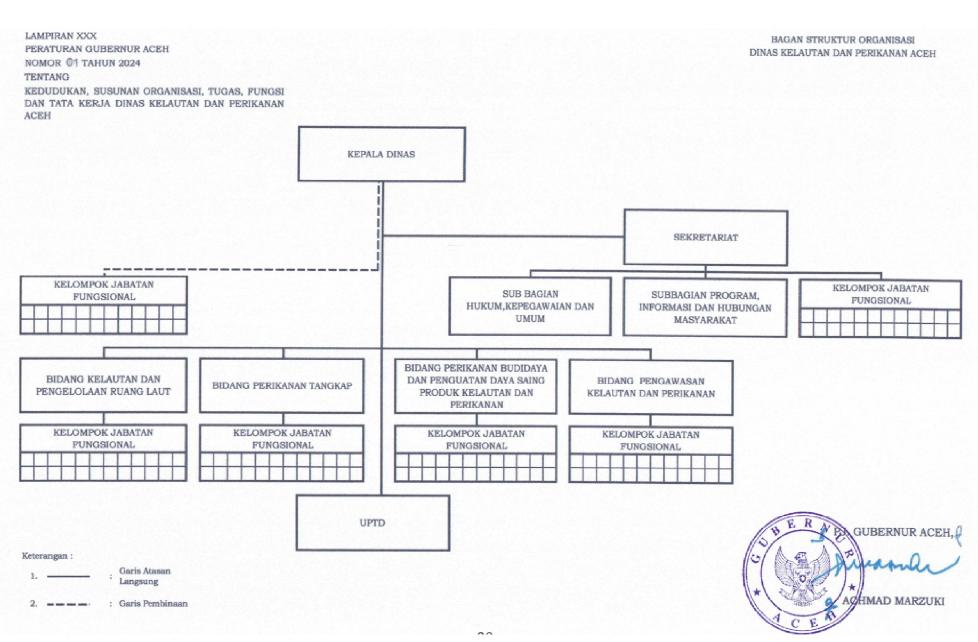
UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sesuai Peraturan GUbernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 adalah :

- 1. UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja (UPTD Kelas A);
- 2. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD Kelas A);
- 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi (UPTD Kelas A);
- 4. UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD Kelas A); dan
- 5. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhanhaji (UPTD Kelas B).



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sesuai Pergub Aceh No. 1 Tahun 2024

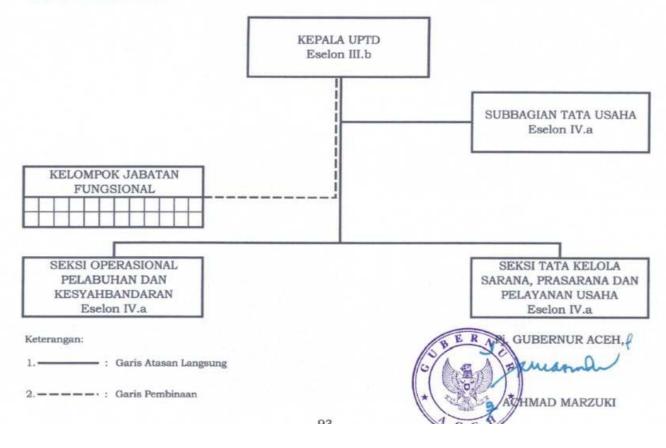




Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD PPS Kutaraja sesuai Pergub Aceh No. 1 Tahun 2024

LAMPIRAN XCIII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA KUTARAJA PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA





Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD PPMHP sesuai Pergub Aceh No. 1 Tahun 2024

LAMPIRAN XCIV BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERATURAN GUBERNUR ACEH UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL NOMOR 01 TAHUN 2024 PERIKANAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH KEPALA UPTD Eselon III.b SUBBAGIAN TATA USAHA Eselon IV.a KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENGUJIAN MUTU SEKSI PENERAPAN MUTU Eselon IV.a Eselon IV.a Keterangan: - : Garis Atasan Langsung 2. --- : Garis Pembinaan

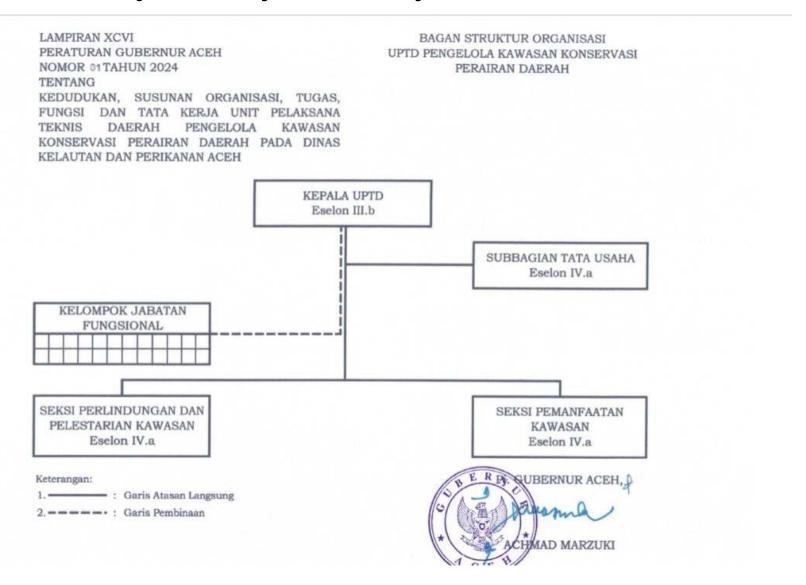


Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD PPN Idi sesuai Pergub Aceh No. 1 Tahun 2024

LAMPIRAN XCV BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERATURAN GUBERNUR ACEH UPTD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA IDI NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA IDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH KEPALA UPTD Eselon III.b SUBBAGIAN TATA USAHA Eselon IV.a KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI OPERASIONAL DAN SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA KESYAHBANDARAN Eselon IV.a Eselon IV.a. Keterangan: GUBERNUR ACEH, D : Garis Atasan Langsung 2. ---: Garis Pembinaan CHMAD MARZUKI



Gambar 5. Struktur Organisasi UPTD Pengelola KKPD sesuai Pergub Aceh No. 1 Tahun 2024

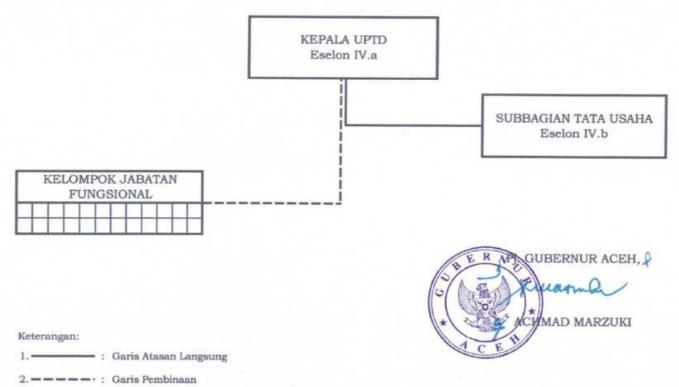




Gambar 6. Struktur Organisasi UPTD PPP Labuhan Haji sesuai Pergub Aceh No. 1 Tahun 2024

LAMPIRAN XCVII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
LABUHANHAJI PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUHANHAJI





Gambaran Umum Geografis Peraian Aceh

Aceh terletak pada koordinat 2 ° – 6 ° LU dan 95 ° – 98 ° BT. Aceh memiliki luas daratan 57.365,67 km², dikelilingi Samudera Hindia di wilayah barat – selatan Aceh, sementara di wilayah utara-timur Aceh bersinggungan dengan perairan Andaman dan Selat Malaka. Panjang garis pantai Aceh adalah 2.817,9 km, sedangkan luas perairan laut 42.665,67 km². Aceh memiliki kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan oleh Gubernur Aceh dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 7. Peta Provinsi Aceh

VANCACITA

PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

Capaian Kinerja sektor Kelautan dan Perikanan Aceh

Pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki 2 Sasaran Strategis (SS) dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada tahun 2023 didominasi oleh capaian yang diharapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada masing-masing sasaran strategis, terdapat 7 dari 9 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target dengan nilai capaian lebih dari 100%, yaitu: Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi), Produksi Perikanan, Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh, Konsumsi Ikan, Persentase kawasan konservasi yang dikelola dan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perudangudangan yang berlaku. Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki nilai capaian kurang dari 100 % yaitu: Nilai Ekspor Perikanan dan Produksi Garam.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023

N O.	SASARAN STRATEGI S	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya .	kesejahteraan petani (dan nelayan		105,79
		lai Tukar Nelayan TN)	102,50	110,08	107,39
	Pe	lai Tukar mbudidaya ikan TPi)	97,54	112,55	115,39
		oduksi perikanan on)	350.131,21	359.453,95	102,66
		oduksi perikanan angkap (ton)	237.214,46	247.434,35	104,31
		oduksi perikanan ıdidaya (ton)	112.916,75	112.019,60	99,21



2	Meningkatn perikanan	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan						
		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,30	5,62*	106,04			
		Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.153.806,00	2.141.627,00*	99,43			
		Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	59,37	65,93*	111,05			
		Produksi garam (ton)	10.600,00	9.388,90	88,57			
		Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	40,00	41,98	104,95			
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perudang- udangan yang berlaku (%)	62,00	69,00	111,29			

Berdasarkan paparan deskriptif Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh di Tahun 2023 secara umum mampu merealisasikan sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya dengan optimal dan sesuai target yang diharapkan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh. Persentase tingkat capaian NTN tahun 2023 adalah 107,40 %, dimana Realisasi NTN adalah 110,08% dengan target 102,50%. Realisasi NTN selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 mengalami trend positif dimana NTN pada tahun 2019 adalah 101,90, pada tahun 2020 adalah 97,48, tahun 2021 sebesar 105,07, tahun 2022 sebesar 107,79 dan di tahun 2023 yaitu sebesar 110,08%, yang



mengalami peningkatan sebesar 2,29% dari tahun 2022. Target akhir NTN pada periode akhir Rencana Strategis (tahun 2026) adalah 104.

NTPi

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) merupakan alat ukur pendapatan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2023 mencapai sebesar 112,55 atau sebesar 115,39 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 yang besarnya 100, maka capaian tahun 2023 sudah mencapai target 112,55 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2022 yang capaiannya 105,94, maka terjadi peningkatan sebesar 6,61 persen. Tercapainya target NTPi tahun 2023 disebabkan karena karena peningkatan margin keuntungan penjualan ikan juga disertai peningkatan volume produksi.

Produksi Perikanan

Produksi perikanan tahun 2023 ditargetkan 350.131,21 ton, dan realisasinya sebesar 359.453,95 ton atau mencapai 102,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 14,52%, untuk pertumbuhan produksi perikanan selama 5 (lima) tahun 2019-2023 sebesar 17,73%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh tahun 2023-2026 yaitu sebesar 390.455.32 ton maka realisasi tahun 2023 telah tercapai sebesar 92,06%.

- Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2023 adalah sebanyak 247.434.35 ton atau mencapai 104,31% dari



target tahun 2023 yaitu sebesar 237,214,46 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 97,52% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 241.306,05 ton dan sisanya sebesar 2,47% atau 6.128,30 ton berasal dari tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD).

Volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata dari tahun 2019 s.d tahun 2023 dengan periode yang sama sebesar 33,13%, yaitu sebesar 209.174,39 ton pada tahun 2019 menjadi sebesar 247.434,35 ton pada tahun 2023. Sedangkan Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra 2023-2026 sebesar 231.568,00 ton maka capaian telah melampaui target sebesar 106,85%.

Tabel 2. Rincian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2023 Menurut Komoditas Ikan Utama (Ton)

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-
		2019	2020	2021	2022	2023*	rata/Tahun(%)
I	Perikanan tangkap	209.174,39	211.266,13	283.676,36	285.094,74	247.434,56	33,13
Α	Perikanan Tangkap laut	202.899,15	204.921,93	275.116,63	276.526,45	241.306,23	33,22
1	Tuna/Cakalang/Tongkol	110.869,35	111.978,05	150.343,11	151.527,40	142.938,99	34,92
2	Kakap	20.625,58	21.391,61	28.679,73	28.809,16	21.813,19	33,38
3	Kembung	8.821,34	9.517,14	12.759,63	12.772,39	11.772,39	40,49
4	Tenggiri	9.655,25	9.751,80	13.074,24	13.087,32	8.066,78	27,50
5	Selar	18.227,88	19.655,76	26.352,48	26.378,83	20.378,21	37,45
6	Rajungan dan Kepiting	9.444,13	9.538,57	13.023,01	13.036,04	8.019,04	29,93
7	Lobster	4.475,94	4.520,70	6.172,11	6.178,28	6.134,32	37,49
8	Ikan Lainnya	20.779,68	18.568,30	24.712,32	24.737,03	22.183,31	20,48
В	Perikanan Tangkap PUD	6.275,24	6.344,20	8.559,73	8.568,29	6.128,33	30,43
1	Ikan	4.531,37	4.172,20	5.696,30	5.702,00	4.102,00	23,09
2	Udang	1.734,14	2.161,36	1.892,37	1.894,27	1.038,19	3,25
3	Lainnya	9,73	10,64	971,05	972,02	988,14	9036,17

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

- Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 sebesar 112.019,60 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yakni sebesar 112.916,75 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 99,21%. Produksi perikanan budidaya tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 135.405,97 ton atau 20,87%.



Jika dilihat selama periode 2019-2023, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut terus mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 22,28% per tahun dari 107.309,24 ton di tahun 2019 menjadi 112.916,75 ton di tahun 2023. Sedangkan realisasi volume produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 112.916,75 ton atau mencapai 93,80% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2023-2026 yaitu sebesar 119.418,38 ton.

Tabel 3. Rincian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023 Menurut Komoditas Utama (Ton)

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-
		2019	2020	2021	2022	2023*	rata/Tahun(%)
I	Perikanan Budidaya	107.309,24	108.382,33	134.270,70	135.405,97	112.019,60	22,28
1	Bandeng	16.101,71	16.262,73	22.351,54	22.530,35	21.121,44	37,99
2	Belanak	2.112,47	2.133,60	-	-	-	0,20
3	Mas	9.096,21	9.187,17	11.162,41	11.251,71	8.231,71	17,93
4	Lele	19.598,21	19.794,19	24.049,94	24.242,34	16.125,66	16,60
5	Patin	480,82	485,63	590,04	594,76	622,19	24,22
6	Nila	13.590,24	13.726,14	16.677,26	16.810,68	9.626,89	14,75
7	Kerapu	2.415,51	2.439,67	2.964,19	2.987,91	2.122,44	17,51
8	Udang	42.239,06	42.661,45	54.446,48	54.943,17	53.113,20	28,87
9	Ikan Lainnya	1.675,00	1.691,75	2.028,82	2.045,05	1.056,08	12,05

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga berlaku) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDRB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, distribusi PDRB sub sektor perikanan atas harga berlaku tahun 2023 adalah sebesar 5,62% atau memenuhi 106,04% dari target tahun 2023 yaitu 5,30%. Dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2022 yang besarnya 5,18% maka mengalami pertumbuhan sebesar 0,44% dan kenaikan rata-rata per tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,24%. Realisasi pertumbuhan PDRB sub



Perikanan tahun 2023 telah mencapai 103,12% dari target akhir Renstra yang ditetapkan yakni sebesar 5,45%.

Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2023 adalah 65,93 kg/kapita/tahun, atau naik 5,35% dibandingkan dengan capaian tahun 2022, yang besarnya 60,58 kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2023 telah memenuhi target sebesar 59,37 kg/kapita/tahun atau mencapai 111,05% dari target.

Produksi Garam

Pada tahun 2023 produksi garam tertinggi terdapat pada Kabupaten Pidie sebesar 4.748,80 ton, kemudian diikuti Kabupaten Pidie Jaya sebesar 1.809,80 ton, Aceh Utara sebesar 1.038,40 ton, Bireuen sebesar 910,70 ton, Aceh Besar sebesar 495,5 ton, Aceh Timur sebesar 200,20 ton, Aceh Barat Daya sebesar 93,70 ton dan Aceh Selatan sebesar 91,80 ton.

Tabel 4. Produksi Garam (Ton) Per Kabupaten Sentra Garam Aceh

NO	КАВ/КОТА	PRODUKSI (TON)							
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023*			
1	Aceh Selatan	144,12	148,88	114,20	108,57	91,80			
2	Aceh Barat Daya	70,76	84,32	80,78	74,99	93,70			
3	Aceh Besar	749,03	978,68	991,36	732,00	495,50			
4	Pidie	4.768,02	1.016,90	3.777,67	3.803,01	4.748,80			
5	Pidie Jaya	650,01	825,42	2.952,78	2.864,85	1.809,80			
6	Bireuen	4.173,84	4.242,16	3.950,86	3.354,42	910,70			
7	Aceh Utara	1.420,20	2.033,29	1.423,08	881,39	1.038,40			
8	Aceh Timur	573,00	329,59	204,32	193,38	200,20			
TOTAL PRODUKSI		12.548,98	9.659,24	13.495,05	12.012,61	9.388,90			

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara